

Evaluasi Kebijakan Fitur *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)* Di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku

Nurul Annisa^{1*}, Mohamad Arsad Rahawarin², Hengky Virgo Richardo Pattimukay³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Pattimura, Jl. Ir. M. Puttuhena, Kota Ambon, Provinsi Maluku, Indonesia
Email: nurulannis2001@gmail.com^{1*}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi kebijakan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) dalam upaya mendorong digitalisasi Sistem Pembayaran di Provinsi Maluku. Dengan banyaknya keunggulan QRIS penggunaan QRIS tersebut diharapkan dapat meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat berkelanjutan bersamaan dengan pergeseran pola kegiatan ekonomi dari konvensional menjadi digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana peneliti menggunakan wawancara untuk memperoleh data dari para responden. Polusi penelitian ini dalah pengguna Pegawai BI dan pegawai pada bank – bank komersial serta masyarakat yang menetap di Provinsi Maluku. Variabel pada penelitian ini terdiri dari 6 Variabel yaitu Efektivitas, Efisiensi, Ketetapan, Kecukupan, Pemerataan, dan Responsivitas. Berdasarkan analisis data dihasilkan bahwa evaluasi kebijakan memiliki pengaruh positif dalam mendorong digitalisasi system pembayaran di Provinsi Maluku secara persial. Dan fitur QRIS tersebut sangat membantu system pembayaran secara non tunai dengan mudah.

Keywords: Digitalisasi, Kebijakan, QRIS, Sistem pembayaran

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi pada zaman modern ini sudah semakin pesat, semakin berkembangnya zaman semakin canggih juga teknologi yang dihasilkan. Hal ini membuat manusia semakin dimudahkan dengan adanya alat-alat teknologi canggih untuk membantu dalam menyelesaikan pekerjaan sehari-hari. Berkembangnya teknologi saat ini tidak hanya membawa dampak positif bagi kehidupan masyarakat, melainkan juga membawa dampak positif bagi kehidupan masyarakat, melainkan juga membawa dampak negative.

Sistem pembayaran dan instrumennya terus mengalami evolusi seiring dengan perkembangan teknologi, perjalanan atau evolusi uang dan sistem pembayaran (Srikaningsih, 2020). Awalnya manusia

melakukan transaksi dengan pertukaran barang atau jasa untuk barang atau jasa yang lainnya, kemudian transaksi menggunakan instrumen uang kartal yaitu uang logam dan kertas yang berlaku di seluruh lapisan masyarakat Indonesia untuk digunakan sebagai alat tukar-menukar barang dan jasa, selanjutnya sistem pembayaran berevolusi menjadi penggunaan paper based atau alat pembayaran berbasis kertas sebagai instrumennya, seperti cheque, bilyet giro, nota debit, dan nota kredit.

Pengalaman menunjukkan bahwa jumlah uang beredar di luar kendali dapat menimbulkan konsekuensi atau pengaruh yang buruk bag perekonomian secara keseluruhan (Solikin, 2003).

Melihat dari banyaknya praktik yang ada sistem pembayaran digital sangat efisien

dalam penggunaannya. Meskipun demikian masih banyak masyarakat Indonesia yang belum menggunakan fasilitas ini. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih banyaknya pengguna uang cash untuk membayar barang atau jasa. Konsumen pengguna sistem pembayaran digital saat ini umumnya didominasi oleh masyarakat kelas menengah hingga menengah atas, maupun masyarakat yang sudah melek teknologi. Sehingga pemerataan penggunaan uang elektronik di Indonesia dirasa masih kurang.

Dengan banyaknya dompet-dompet digital yang bermunculan dapat menurunkan tingkat keamanan dan pengawasan dibidang jasa keuangan, dan dapat menimbulkan permasalahan jika tidak diawasi dan tidak dilakukan tindakan pengamanan secara langsung. Oleh karena itu bank Indonesia melakukan inovasi baru untuk mengejar perkembangan teknologi tersebut, yaitu tepatnya pada HUT RI ke 74 di tahun 2019, bank Indonesia sebagai otoritas tertinggi yang mengatur perbankan di Indonesia meluncurkan fitur baru yaitu QRIS (Quick ResponseCode Indonesian Standard).

Agustino (2006) dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Kebijakan Publik bahwa evaluasi ditujukan untuk melihat sebagian-sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan.

Bank Indonesia selalu mengupayakan penambahan penggunabaru system pembayaran QRIS sebagai salah poin yang disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dalam webinar Casual Talks

on Digital Payment Innovation of Banking yaitu Bank Indonesia memperluas penggunaan sistem pembayaran berbasis QR Code Indonesia (QRIS) dengan menargetkan 15 Juta pengguna baru pada tahun 2022.

Bank Indonesia dalam hal ini Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran.

William N. Dunn, memberikan arti pada istilah evaluasi bahwa:“Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assessment), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan” (Dunn, 2003).

William. N Dunn dalam Soulisa (2017) mengajukan enam tipe kriteria yang dapat digunakan, kriteria evaluasi terbagi atas 6 indikator yaitu: 1) Efektifitas, 2) Efisiensi, 3) Kecukupan, 4) Perataan, 5) Responsifitas, 6) Kecukupan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang pada umumnya bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif, dilakukan dengan situasi wajar (natural setting) dan data dikumpulkan umumnya bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif pada dasarnya menghendaki adanya

batas dalam penelitiannya atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah dalam penelitian. Penelitian kualitatif menyusun desain.

Waktu penelitian ini dilaksanakan setelah proposal ini diseminarkan dan direvisi oleh peneliti. Lokasi pelaksanaan penelitian ini dilakukan di Kota Ambon, Provinsi Maluku.

Untuk memperoleh data yang diinginkan dan relevan dengan penelitian ini maka teknik pengumpulan data sebagai berikut: observasi, wawancara, dokumentasi. informan penelitian ini terdiri dari informan utama dan informan pendukung, informan utama terdiri dari 1 orang manajer di unit implementasi kebijakan sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah dan 2 orang asisten manager di unit implementasi kebijakan sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah. Dalam implementasi kebijakan QRIS di dukung oleh informan pendukung, informan pendukung terdiri dari, 2 orang staff bank BRI, 2 orang staff bank mandiri, 2 orang Staff bank BTN, dan 5 orang masyarakat, yang juga terlibat dalam kebijakan penggunaan QRIS. Teknik pengumpulan data menggunakan *purposive sampling* (Sugiyono (2012)).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Efisiensi

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan ternyata dalam hal ini QRIS telah membuat suatu kemudahan dalam tahap atau proses pembayaran yang berbasis digital. Cara mengetahui bahwa QRIS itu aman yaitu karena aplikasinya dibuka sendiri oleh konsumen sendiri kemudian ada pin nya dan di

approve sendiri oleh konsumen dan tidak ada campur tangann oleh merchant. QRIS mempunyai MerchantDiscontRate yang dikenakan kepada merchant sebesar 0,7%. Kemudian terserah kebijakan merchant apakah dia akan mengenakan pada konsumen atau tidak. QRIS dapat ditemukan di pedagang-pedagang yang sudah menggunakan QRIS.

2. Efektifitas

Penggunaan QRIS terus dipantau berdasarkan jumlah pertumbuhan baik dari sisi supply (merchant QRIS) maupun dari sisi demand (user atau pengguna QRIS). Pertumbuhan transaksi juga menjadi salah satu indikator dalam menilai seberapa jauh adopsi teknologi tersebut di masyarakat Maluku.

Selain dari sisi indikator pencapaian tersebut, dilakukan juga langkah antisipasi berupa edukasi terkait perlindungan konsumen sehingga selain dari aspek kenyamanan juga didorong terus bagaimana aspek keamanan bertransaksi dapat dilakukan. Bentuk evaluasi yang telah dilakukan berupa survei kepada masyarakat yang dituangkan dalam bentuk laporan analytical notes. Dari hasil kajian tersebut ditemukan beberapa poin yang perlu dilakukan. Selain itu, masukan dari para stakeholder baik pihak perbankan, masyarakat, pemda dan stakeholder lain juga dicatat pada saat dilakukan focus group discussion (FGD) sebaga bahan evaluasi dan penguatan program ke depan.

3. Kecukupan

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dalam hal ini KpwBI Provinsi

Maluku masih terus berupaya agar penggunaan QRIS semakin optimal dalam penerapannya di lingkungan masyarakat Provinsi Maluku. Jadi, secara umum bisa dikatakan bahwa sosialisasi QRIS dari pihak Bank sudah cukup namun diperlukan lagi langkah – langkah agar semua orang di seluruh provinsi Maluku memiliki pemahaman yang baik tentang penggunaan QRIS ini.

4. Perataan

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan ternyata dalam hal ini, KPwBI Provinsi Maluku sudah menetapkan strategi atau upaya dalam hal meningkatkan kemampuan masyarakat dalam konteks penggunaan QRIS. Hal demikian di lakukan KPwBI Provinsi Maluku agar masyarakat meningkatkan awareness dan adaptasi transaksi QRIS ynag mulai muncul dari berbagai daerah.

5. Responsivitas

Bersdasarkan hasil wawancara ternyata dalam hal ini, KpwBI Provinsi Maluku selalu berusaha agar mampu dan dapat memuaskan kebutuhan masyarakat dalam hal keberhasilan pembayaran digitalisasi yang lebih praktis.

KPw Bank Indonesia Prov. Maluku melibatkan pemangku kepentingan seperti pedagang, pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM), dan konsumen dalam proses pengembangan QRIS. Hal ini dilakukan agar mereka dapat memberikan masukan langsung serta mendapatkan pemahaman lebih baik tentang manfaat dan cara menggunakan QRIS.

6. Ketetapan

Berdasarkan hasil wawancara ternyata dalam hal ini KpwBI Provinsi Maluku sudah melakukan atau menetapkan kebijakan

penyaluran QRIS sebagai alat pembayaran elektronik yang bisa mempermudah masyarakat dalam hal segi pemabayaran. Ketetapan yang di keluarkan bersifat kebijakan bukan ketetapan atau kriteria individu penerima.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis data dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Efisiensi ini ditandai dengan penggunaan QRIS ini sangat meminimumkan waktu, biaya dan juga tenaga bagi pengguna. QRIS telah membuat suatu kemudahan dalam tahap atau proses pembayaran yang berbasis digital. Cara mengetahui bahwa QRIS itu aman yaitu karena aplikasinya dibuka sendiri oleh konsmen sendiri kemudian ada pin nya dan di approve sendiri oleh konsumen dan tidak ada campur tangann oleh merchant. QRIS mempunyai MerchantDiscontRate yang dikenakan kepada merchant sebesar 0,7%. Kemudian terserah kebijakan merchant apakah dia akan mengenakan pada konsumen atau tidak. Evaluasi kebijakan transaksi (QRIS) dilakukan untuk melihat peningkatan kebijakan (QRIS) yang kami lakukan, sehingga evaluasi ini kami akan melakukan pengkajian dan mengangkat beberapa poin yang sudah dievaluasi, kemudian kami masukan pada yang namanya stackholder sebagai catatan (FGD) untuk penguatan program ke depannya.
2. Efektivitas tersebut ditunjukkan pada kemudahan dalam transaksi pembayaran

dan juga transaksi menggunakan QRIS lebih fleksibel. Efektifitas penggunaan QRIS terus dipantau berdasarkan jumlah pertumbuhan baik dari sisi supply (merchant QRIS) maupun dari sisi demand (user atau pengguna QRIS). Fitur QRIS ini sangat efektif dan efisien bagi para pengguna QRIS tersebut, karena ini akan memudahkan orang yang memakai QRIS ini disaat lagi tidak membawa uang cash dalam bentuk fisik, dan menggunakan QRIS sebagai alternative pembayaran.

3. Kecukupan dalam hal ini KpwBI Provinsi Maluku masih terus berupaya agar penggunaan QRIS semakin optimal dalam penerapannya di lingkungan masyarakat Provinsi Maluku. Jadi, secara umum bisa dikatakan bahwa sosialisasi QRIS dari pihak Bank sudah cukup namun diperlukan lagi langkah – langkah agar semua orang di seluruh provinsi Maluku memiliki pemahaman yang baik tentang penggunaan QRIS ini. perspektif aktif pelaku usaha dan komunitas lokal juga sangat penting dalam menyebarkan informasi kepada orang – orang disekitarnya, jadi walaupun sudah banyak upaya yang dilakukan dalam mensosialisasi QRIS kepada masyarakat secara umum, tetap diperlukan dukungan dari berbagai pihak supaya semua orang bisa mendapatkan pengetahuan yang cukup tentang penggunaan dan pemanfaatannya.
4. Perataan Kpw BI Provinsi Maluku sudah menetapkan strategi atau upaya dalam hal meningkatkan kemampuan masyarakat dalam konteks penggunaan QRIS. Hal demikian di lakukan KPwBI Provinsi Maluku agar masyarakat meningkatkan awareness dan adaptasi transaksi QRIS yang mulai muncul dari berbagai daerah. KPwBI Maluku telah menetapkan strategi dalam upaya meningkatkan penggunaan QRIS pada masyarakat di Provinsi Maluku. Dari aspek pemerataan, KPwBI Provinsi Maluku mendorong peningkatan awareness dan adaptasi transaksi QRIS di berbagai daerah lainnya, karena saat ini penetrasi transaksi QRIS masih banyak terpusat di Kota Ambon baik dari sisi volume maupun nominal transaksi.
5. Responsivitas KPw BI Provinsi Maluku selalu berusaha agar mampu dan dapat memuaskan kebutuhan masyarakat dalam hal keberhasilan pembayaran digitalisasi yang lebih praktis. Responsivitas kebijakan KPw Bank Indonesia Prov. Maluku sudah cukup baik. Kita telah mengambil langkah yang cukup cepat dalam merespons perkembangan teknologi pembayaran digital dan memperkenalkan QRIS sebagai solusi untuk meningkatkan efisiensi transaksi.
6. Ketetapan Kpw BI Provinsi Maluku sudah melakukan atau menetapkan kebijakan penyaluran QRIS sebagai alat pembayaran elektronik yang bisa mempermudah masyarakat dalam hal segi pemabayaran. Ketetapan yang di keluarkan bersifat kebijakan bukan ketetapan atau kriteria individu penerima. Penetapan fitur pembayaran elektronik yang disahkan oleh Bank Indonesia yang kita kenal dengan sebutan QRIS, di berlakukan mulai tahun 2019 dan diperkenalkan kepada masyarakat dan bisa digunakan dalam hal

pembayaran mulai dari transfer dll. Hal ini duberlakukan oleh Bank Indonesia agar mempermudah masyarakat.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. M. A. Rahawarin. MS dan Bapak Dr. Hengky V. R. Pattimukay, S.Sos, M.Si selaku pembimbing sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini. Serta masukan dan saran yang telah diberikan agar naskah ini lebih baik dan layak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2006). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*: Bandung: AIPI Bandung-Puslit KP2W Lemlit Unpad 2006b. *Politik dan Kebijakan Publik*.
- Dunn, William. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Solikin, W. P. (2003). *Kebijakan Moneter di Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Soulisa, N. S. (2017). *Evaluasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Pada Sekolah Negeri Di Kecamatan Palu Timur*. *Katalogis*, 5(1).
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Badung: Alfabeta.
- Sriekaningsih, A. (2020). *QRIS dan Era Baru Transaksi Pembayaran 4.0*. Penerbit Andi.